

PENGARUH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE

Puji Handayati

Universitas Negeri Malang
puji.handayati.fe.@um.ac.id

Abstract: *Triple Bottom Lines Concept explain that corporation did not only responsible for financial performance like in single bottom line, but also concerned in social and environmental performance. It means factors that affecting corporate social responsibility disclosure have to be known. This research is going to know the effect of environmental performance variable proxy with corporate environmental performance that measured with PROPER. Good environmental performance will motivate corporation to increase corporate social responsibility (CSR). And corporate governance mechanism variable that proxies with institutional possession, commissioner board, independent commissioner board, and audit committee. Good Corporate Governance will motivate corporation to disclose CSR. Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD) using Global Reporting Initiative (GRI) indicator. Research design was asosiatif kausalitas. The population were 154 manufacture companies that listed in Bursa Efek Indonesia periode 2009–2011. For its sample, this research used purposive sampling obtained 11 companies. And the method of data analysis used multiple linear regression. The result analysis showed that environmental performance and audit committee have positive significant influence on CSRSD while corporate governance mechanism that proxies with institutional possession and independent commissioner board did not influence CSRSD. It showed that higher environmental performance followed with increased CSRSD and better monitoring mechanism to management would create good corporate governance that motivate to do CSRSD.*

Keywords: *environmental performance, corporate governance mechanism, Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD)*

Permasalahan lingkungan perusahaan semakin menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, dampak lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan harus segera diatasi. Perusahaan harus mempunyai *environmental performance* (kinerja lingkungan) yang baik guna menjaga *image* positif dikalangan *stakeholder* perusahaan.

Environmental performance merupakan kinerja perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pemerintah juga telah mengatur kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia

nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 14 bahwa, 1) untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, 3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan, dan penanggulangan kerusakan, serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk mengukur kinerja perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggunakan peringkat (*environmental performance rating*) yang dilakukan dalam PROPER (Program Penilaian

Peringkat Pengelolaan Lingkungan pada Perusahaan) yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku (KLH, 2009). *Environmental Performance* diukur dengan pemeringkatan berdasarkan PROPER dalam lima (5) warna, dimulai dari peringkat tertinggi, yakni emas, hijau, biru, merah, dan hitam.

Corporate governance merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2003). Mekanisme *corporate governance* merupakan pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan terhadap kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Lemahnya mekanisme *corporate governance* dalam sebuah perusahaan menimbulkan peluang terjadinya praktik manipulasi laporan keuangan.

Adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (sebagai agen) dan pemilik, yaitu pemegang saham (sebagai prinsipal) merupakan masalah yang dapat menghambat tujuan utama perusahaan. Pihak manajemen yang berambisi bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi (*self interest*) tanpa memandang kepentingan prinsipal menyebabkan terjadinya manipulasi laporan keuangan.

Dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan sudah mulai dirasakan *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu, masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* perusahaan menuntut perusahaan agar senantiasa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya dan berupaya mengatasinya. Atas tuntutan tersebut, maka salah satu jalan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar tidak mengabaikan kepentingan *stakeholder* dan segera mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang terjadi di perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan bentuk pertanggungjawabannya terhadap sosial dan lingkungan dalam laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Penelitian tentang kaitan kinerja lingkungan dengan pengungkapan CSR dilakukan oleh Rakhiemah dan Agustia (2009). Penelitian tersebut berhasil menemukan pengaruh positif *environmental performance* terhadap *CSR-disclosure* perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2009) juga memperkuat hasil penelitian Rakhiemah dan Agustia (2009) bahwa *environmental performance* yang diprosikan dengan PROPER berpengaruh

positif secara signifikan terhadap *CSR disclosure*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Lindrianasari (2007) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan, jika diprosikan dengan PROPER, terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Mekanisme *corporate governance* yang baik akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas lagi dan lebih transparan sehingga pihak manajemen akan berusaha mengungkapkan *corporate social responsibility* di dalam laporan tahunannya. Dengan adanya *corporate social responsibility disclosure* dalam perusahaan, perusahaan bisa menarik perhatian investor untuk percaya bahwa modal yang ditanamkan tidak memiliki resiko yang tinggi dan akan mendapatkan *return* yang memuaskan.

Penelitian Terzaghi (2012) menyebutkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara mekanisme *corporate governance* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009), yaitu terdapat pengaruh antara *corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Badjuri (2011), yang meneliti hubungan mekanisme *corporate governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD)*, menemukan hasil penelitian secara parsial, yaitu tidak ada pengaruh antara dewan komisaris terhadap CSRSD, terdapat pengaruh signifikan antara dewan komisaris independen dengan CSRSD, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap CSRSD. Penelitian Utami dan Rahmawati (2006), yang meneliti hubungan ukuran dewan komisaris dengan CSRSD, menemukan pengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure* dan tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap CSRSD.

Hasil tidak konsisten oleh beberapa peneliti menunjukkan fenomena yang menarik dan perlu dilakukan pengujian ulang. Fenomena lainnya adalah bahwa ukuran pengungkapan CSR berbeda di antara beberapa peneliti. Rakhiemah dan Agustia (2009) menggunakan pendapat Hackston dan Milne (1996)⁴ sementara Nurkhin (2009) menggunakan indikator dari GRI.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dasar dari teori ini adalah hubungan antara prinsipal dengan agen. Dalam *agency theory*, yang disebut *principal* adalah pemegang saham dan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pada saat pemegang saham menunjuk manajer atau *agent* sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan, saat itulah hubungan keagenan muncul. Dalam manajemen keuangan, hubungan keagenan muncul antara pemegang saham dan manajer serta antara manajer dan kreditor.

Menurut Scott (2004)⁵, hubungan pemilik-manajer dalam teori agensi merupakan sebuah proksi untuk sejumlah besar investor dan manajer yang menggambarkan pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian sebagai sebuah model untuk dua individu yang rasional dengan kepentingan yang saling bertentangan. Mardiyah (2004)⁶ menyebutkan bahwa dalam teori keagenan perusahaan merupakan titik temu hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*), dengan masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas.

Biaya Keagenan (*Agency Costs*)

Mekanisme pengawasan dalam rangka untuk meyakinkan bahwa manajemen bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingannya, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost*. Menurut Weston dan Copeland (2010: 46), biaya keagenan atau *agency cost* yaitu biaya yang menentukan cara-cara pokok dan agen membuat kontrak untuk mengorganisasikan kepemilikan dari perusahaan bersangkutan (misalnya, campuran hutang/ekuitas). Menurut Sartono (2001:15), *agency cost* tercermin dalam aktivitas berikut ini: (1) Pengeluaran untuk *monitoring* seperti biaya pemeriksaan akuntansi dan prosedur pengendalian internal. Biaya tersebut harus dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi pemilik perusahaan. (2) Pengeluaran insentif sebagai kompensasi manajemen atas prestasi yang konsisten untuk memaksimalkan nilai

perusahaan. Bentuk insentif yang umum adalah *stock option*, yaitu pemberian hak kepada manajemen untuk membeli saham perusahaan di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan. Bentuk kedua adalah *performance share*, yaitu pemberian saham kepada manajemen atas tujuan pencapaian tingkat *return* tertentu. Pemberian insentif sering pula berupa pemberian *cash bonus* yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan tertentu. (3) *Fidelity bond*, yaitu kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga *bonding company* setuju untuk membayar perusahaan jika manajemen berbuat tidak jujur sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. *Fidelity bonding* mempunyai pengertian hampir sama dengan asuransi kerugian atas praktik yang tidak jujur. (4) *Golden Parachutes* dan *Poison Pill* dapat digunakan untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. *Golden parachutes* adalah suatu kontrak antara manajemen dan pemegang saham yang menjamin bahwa manajemen akan mendapat kompensasi apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain atau terjadi perubahan pengendalian perusahaan. Sedangkan *poison pill* adalah usaha pemegang saham agar perusahaan tidak diambil alih oleh perusahaan lain. Usaha ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan hak penjualan saham pada harga tertentu atau mengeluarkan obligasi disertai dengan hak penjualan obligasi pada harga tertentu sehingga apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain, pembeli perusahaan wajib membeli saham dan obligasi pada harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah mengetahui konflik keagenan dapat diperkecil, perlu dilakukan pengawasan agar sesuai dengan skenario dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pekerjaan manajer dapat dipantau. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara: (1) memberi insentif yang memadai berupa imbalan yang langsung diberikan dan berupa fasilitas dari jajaran staf yang mendukung, (2) mengawasi keputusan-keputusan (Martin, *et al.*, 1994 dalam Irmawan, 2005).

Corporate Social Responsibility (CSR)

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi

tanggung jawab organisasi dibidang hukum (Darwin, 2004:26).

Hackston dan Milne (2002:16) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Menurut Crefige (1997:39), lingkungan sosial perusahaan dapat diartikan secara luas, meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, karyawan, lingkungan hidup, pemerintah, dan konsumen. Secara pengertian sempit, lingkungan sosial lebih condong ke pengertian karyawan perusahaan sehingga tanggung jawab sosial perusahaan lebih terfokus pada kesejahteraan karyawannya.

Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan

Faktor yang mempengaruhi implementasi dan pengungkapan CSR diantaranya adalah *political economy theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory* (Craven and Shrivess, 2002:35). Haigh dan Jones (2006:18) mengungkapkan bahwa terdapat 6 faktor yang mempengaruhi praktik CSR oleh perusahaan. Keenam faktor tersebut adalah *internal pressures on business managers*, *pressures from business competitors*, *investors*, *and consumers*, *and regulatory pressures coming from governments*, *and non-governmental organizations*.

Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2010) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut:

”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Guthrie dan Parker (1990) dalam Sayekti dan Wondabio (2007:11) menyatakan bahwa pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Penelitian Basamalah (2005:23) yang melakukan *review* atas *social and environmental reporting and auditing*

dari dua perusahaan di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Inti Indorayon, mendukung prediksi *legitimacy theory* tersebut.

Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela telah diteliti dalam penelitian sebelumnya, diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor (Basamalah, 2005:28).

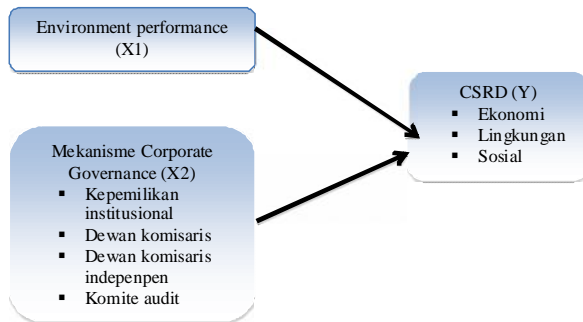
METODE

Desain penelitian ini adalah penelitian *asosiatif kausalitas*. Sugiyono (2008:3) menjelaskan bahwa penelitian *asosiatif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, hubungan *kausal* merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat.

Variabel independen penelitian ini adalah *environmental performance* yang diukur berdasarkan PROPER dan mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah CSRD berdasarkan GRI untuk mengukur indek pengungkapan CSR. Indikator GRI ini dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia.

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial, yaitu pengaruh *environmental performance* terhadap variabel CSRD dan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap CSRD, maupun secara simultan yaitu hubungan antara *environmental performance* dan mekanisme *corporate governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap CSRD. Hubungan antara variabel *environmental performance* dan mekanisme *corporate governance* terhadap CSRD dapat digambarkan sebagaimana gambar 1.

Penelitian ini menggunakan obyek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut sejak periode pengamatan 2009–2011. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI), diketahui bahwa perusahaan manufaktur yang tercatat berturut-turut sejak periode 2009–2011 adalah sebanyak 154 perusahaan. Dari 154 perusahaan manufaktur tersebut, didapatkan sampel penelitian sebesar 11 perusahaan

**Gambar 1.**

Sumber:

yang telah diseleksi melalui kriteria pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Tabel 1.

No.	Kode	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1	INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	Semen
2	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk	Semen
3	SMGR	PT Semen Gresik (Persero) Tbk	Semen
4	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk	Keramik, porselen dan kaca
5	BUDI	PT Budi Acid Jaya Tbk	Kimia
6	TPIA	PT Tri Polyta Indonesia Tbk	Kimia
7	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	Pulp dan kertas
8	INDR	PT Indorama Syntetics Tbk	Tekstil dan garmen
9	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Farmasi
10	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	Farmasi
11	UNVR	PT Unilever Indonesia, Tbk	Consumer goods

Sumber: www.idx.co.id

Deskripsi Variabel

Deskripsi variabel menyajikan deskripsi untuk masing-masing variabel berdasarkan data yang diolah secara deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dari masing-masing variabel yang merupakan interpretasi terhadap hasil analisis variabel tunggal berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, dan nilai maksimum.

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu variabel *environmental performance* (X1) yang diukur melalui peringkat PROPER dan variabel mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan persentase kepemilikan institusional (X2), jumlah dewan komisaris (X3), proporsi dewan komisaris independen (X4), dan jumlah komite audit (X5). Variabel dependen dari penelitian ini adalah *corporate social responsibility disclosure* (Y) berdasarkan indikator GRI yang terbagi dalam 3 indikator yaitu indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja social, dan indikator kinerja lingkungan.

HASIL PENELITIAN

Pengaruh *Environmental Performance* terhadap CSRD

Hasil pengujian variabel *environmental performance* yang diproksi dengan PROPER menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD). Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, nilai signifikan dalam penelitian sebesar 0,038 sehingga penelitian ini menerima hipotesis *environmental performance* berpengaruh terhadap CSRD.

Environmental performance merupakan kinerja lingkungan perusahaan yang dinilai oleh KLH dan dilaporkan melalui laporan PROPER. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel telah menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitar sesuai dengan kriteria dalam PROPER.

Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi peringkat *environmental performance* akan diikuti oleh peningkatan pengungkapan CSR. Sebagai contoh, PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (berdasarkan lampiran 2) pada tahun 2009 mendapatkan peringkat sebesar 5, yaitu peringkat tertinggi dalam PROPER dan diikuti dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure Indeks* (CSRDI) sebesar 0,28 dengan jumlah pengungkapan sebesar 22 indikator. Tingkat CSRDI tertinggi adalah sebesar 0,33 dengan 26 pengungkapan. Hal ini sejalan dengan teori¹⁸ Anugrah (2011:49) yang menyatakan bahwa semakin baik kinerja lingkungan perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya, semakin besar pula pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan teori legitimasi, yang menjelaskan hubungan masyarakat dengan perusahaan, masyarakat memberikan apresiasi terhadap tindakan sosial yang dilakukan perusahaan. Adanya pengungkapan sosial perusahaan yang merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan sudah mampu menjaga kelestarian lingkungan dan mampu beroperasi dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa jika perusahaan melaksanakan kegiatan operasinya dengan baik, maka masyarakat juga akan merespon positif terhadap keberlangsungan hidup perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap CSR

Hasil pengujian variabel mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*. Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan, di mana nilai signifikan dalam penelitian sebesar 0,658, penelitian ini menolak hipotesis mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional) berpengaruh terhadap *CSR*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Pengawasan yang baik terhadap pihak manajemen akan mendorong peningkatan luas *CSR*. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional tidak mampu mendorong dalam melakukan pengungkapan *CSR*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Dalam penelitian ini meskipun kepemilikan institusional tidak mampu memberikan pengawasan yang baik dan tidak mampu mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan laporan *CSR*, namun berdasarkan sampel yang diteliti ternyata semua perusahaan sampel mengungkapkan *CSR*. Pengungkapan *CSR* yang dilakukan perusahaan sampel masih sebatas kewajiban

yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar terhindar dari sanksi yang ada. Hal ini bisa dilihat dari data yang menunjukkan bahwa pengungkapan *CSR* oleh perusahaan sampel masih sangat relatif rendah dibandingkan dengan pengungkapan berdasarkan *GRI*. Hal ini mendukung teori *stakeholder* karena perusahaan tetap menerapkan *CSR* meskipun hanya sebatas yang diwajibkan saja.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap CSR

Hasil pengujian variabel mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan dewan komisaris menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*. Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, nilai signifikan dalam penelitian sebesar 0,013 yang lebih kecil dari nilai yaitu 0,050. Dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis mekanisme *corporate governance* (dewan komisaris) berpengaruh terhadap *CSR*.

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian tertinggi yang bertanggung jawab terhadap *monitoring* aktivitas *top management*. Dengan proses monitoring yang baik, pengungkapan *CSR* diharapkan bisa dilakukan lebih luas lagi karena dapat mengurangi kemungkinan manajer dalam menyembunyikan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian mampu memonitoring pihak manajemen dan menekan pihak manajemen agar mengungkapkan informasi yang lebih luas lagi yaitu *CSR*. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ratnasari (2011:70) bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosialnya. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian dilakukan oleh Utami dan Rahmawati (2006) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris menunjukkan pengaruh terhadap *CSR*. Dalam hal ini, dewan komisaris mementingkan *stakeholder* perusahaan. Oleh sebab itu, dewan komisaris memaksa pihak manajemen untuk mengungkapkan *CSR* agar perusahaan tidak terkena sanksi yang secara tidak langsung akan berakibat terhadap *stakeholder* perusahaan.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap CSR

Hasil pengujian variabel mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*. Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, nilai signifikan dalam penelitian sebesar 0,213 yang lebih besar dari nilai yaitu 0,050. Dengan demikian, penelitian ini menolak hipotesis mekanisme *corporate governance* (dewan komisaris independen) berpengaruh terhadap CSR.

Dewan komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi, obyektivitas dan menetapkan keselarasan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Dalam penelitian ini, perusahaan manufaktur yang menjadi sampel tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari pengawasan dewan komisaris independen. Hasil ini konsisten dengan penelitian Waryanto (2010) yang menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris tidak dapat berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini terjadi dimungkinkan karena pemilihan dan pengangkatan dewan komisaris independen yang kurang efektif (FCGI, 2002). Di samping itu, ada isu yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen hanyalah atas nama saja. Jadi, dewan komisaris independen tidak ditunjuk secara nyata, hanya atas nama saja. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kehadiran dewan komisaris dalam rapat internal yang menunjukkan bahwa tidak banyak dewan komisaris independen yang benar-benar menghadiri setiap rapat yang diadakan oleh dewan komisaris. Oleh sebab itu, proporsi dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi CSR.

Penjabaran di atas sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Meskipun perusahaan tidak mampu mempengaruhi pihak manajemen untuk mengungkapkan CSR, perusahaan dalam penelitian ini tetap mengungkapkan CSR meskipun sebatas kewajiban yang harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi yang telah ditentukan.

Pengaruh Komite Audit terhadap CSR

Variabel mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan komite audit menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*. Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, nilai signifikan dalam penelitian adalah 0,011 yang lebih kecil dari nilai yaitu 0,050. Dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis mekanisme *corporate governance* (komite audit) berpengaruh terhadap CSR. Komite audit merupakan komite yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap pihak manajemen. Menurut Anugrah (2011), jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan akan menambah efektivitas pengawasan termasuk praktik dan pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif signifikan pengaruh komite audit terhadap CSR. Hal ini dikarenakan komite audit melakukan tugas pengawasannya terhadap laporan keuangan dengan baik, sesuai dengan aturan dan bersikap jujur. Meskipun, data ukuran komite audit (dalam lampiran 3) menunjukkan bahwa jumlah komite audit yang dimiliki sebagian besar perusahaan sebatas kewajiban untuk mematuhi peraturan Bapepam nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, tetapi komite audit dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, sehingga dalam penelitian ini ukuran komite audit bisa melakukan pengawasan dengan baik dan mampu mendorong pihak manajemen untuk melaporkan kinerja lingkungan dan sosialnya, tidak hanya melaporkan kinerja keuangannya saja.

Pengaruh Environmental Performance dan Mekanisme Corporate Governance (Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit) terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)

Hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan uji-F, variabel *environmental performance* dan mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit

menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD)*. Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, nilai signifikan dalam penelitian adalah 0,000a. Dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis *environmental performance* dan mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit) berpengaruh terhadap CSRSD. Hal ini dikarenakan jika variabel *environmental performance* dan mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit dianalisis secara bersama-sama atau simultan akan menghasilkan positif signifikan. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap CSRSD tidak mampu mengalahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap CSRSD. Oleh sebab itu, penelitian ini menghasilkan nilai yang positif signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: (1) Variabel *environmental performance* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD)*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peringkat *environmental performance*, maka akan diikuti oleh peningkatan pengungkapan CSR. (2) Variabel mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD)*. Hal ini disebabkan dalam mengambil keputusan investasi, investor institusi belum mempertimbangkan informasi CSR sebagai salah satu kriteria untuk menilai perusahaan, sehingga tidak mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. (3) Variabel mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan dewan komisaris mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD)*. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris mampu memonitor dan menekan pihak manajemen agar mengungkapkan informasi CSR. (4) Variabel mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD)*. Hal ini menunjukkan

bahwa dewan komisaris independen tidak mampu meningkatkan independensi, objektivitas, dan menetapkan keselarasan (*fairness*) dalam melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen, serta tidak mampu mendorong untuk melakukan pengungkapan CSR. (5) Variabel mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan komite audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD)*. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit telah melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan dengan baik sehingga dengan adanya komite audit pada perusahaan mampu menambah efektivitas pengawasan dan pengungkapan CSR. (6) Variabel *environmental performance* dan mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD)*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai variabel *environmental performance* dan mekanisme *corporate governance* mampu mempengaruhi peningkatan pengungkapan CSR sehingga mempengaruhi pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: (1) jumlah sampel penelitian, yang diseleksi berdasarkan kriteria penelitian, hanya diambil dari perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian ini tidak digeneralisasi untuk semua jenis industri, (2) periode pengamatan hanya 3 tahun sehingga hasil penelitian ini kurang memberikan gambaran yang jelas tentang praktik pengungkapan CSR di lapangan, (3) mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini hanya terbatas pada kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit, dan (4) penilaian terhadap indeks CSR antara tiap peneliti tidak sama karena penilaian tersebut bersifat subyektif, tidak ada ketentuan baku dalam melakukan penilaian terhadap indeks CSR.

Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, saran yang dapat diajukan melalui penelitian ini adalah: (1) Menambah jumlah sampel perusahaan. Misalkan, dengan menambahkan perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam, tidak hanya perusahaan

manufaktur saja. (2) Memperluas periode pengamatan sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang praktik pengungkapan CSR di lapangan. (3) Menambah mekanisme *corporate governance* agar hasil penelitian lebih maksimal dan menjelaskan yang sebenarnya. (4) Menambah variabel penelitian yang mampu mempengaruhi pengungkapan CSR. Misalkan, dengan menambahkan variabel ukuran dewan direksi, dewan direksi independen, ukuran perusahaan, rasio likuiditas, rasio *leverage* atau *earning management*, agar hasil penelitian lebih akurat.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, Fr.RR. 2006. *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*. Padang: Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Anugrah, A.W. 2011. *Analisis Pengaruh Environmental Performance, Struktur Corporate Governance, dan Earning Management terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badjuri, A. 2011. *Faktor-faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, no.1, hal. 38–54.
- Daniri, M.A. 2005. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Effendi, M.A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faisal. 2005. *Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan, dan Mekanisme Corporate Governance*. *Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 8 (2), hal. 175–179.
- Falichin, MZM. 2011. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Reaksi Investor dengan Environmental Performance Rating dan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). 2002. *Pedoman Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Jakarta: FCGI.
- Ghozali, I. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R.M., Javad, D.M., Power, dan CD. Sinclair. 2001. *Social and Environmental Disclosure and Corporate Characteristics: a Research Note and Extension*. *Journal of Business Finance and Accounting*. 327–356.
- Hadi, N. 2010. *Corporate Social Responsibility*. Semarang: Graha Ilmu Hartono.
- Hendriksen, E.S., dan MF. Van Breda. 2000. *Teori Akunting*. Edisi 5. Batam: Interaksara.
- Indrawati, N. 2009. *Pengaruh Environmental Performance dan Political Visibility terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Annual Report*. Riau: Universitas Riau.
- Indriantoro, N., dan B. Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Jensen, M., and W. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, vol. 3, pp. 305–60.
- Jogiyanto. 2009. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi keenam. Yogyakarta: BPFE.
- Jurusan Akuntansi. 2007. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi (PPSJA)*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). 2004. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta: KNKCG.
- Lindrianasari. 2007. *Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 11, no.2.
- Nasir, M.N.A., dan S.N. Abdullah. 2004. *Voluntary Disclosure and Corporate Governance among Financially Distressed Firms in Malaysia*. *Financial Reporting, Regulation and Governance*, vol. 3, no. 1.
- Novita, dan C.D. Djakman. 2008. *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) pada Laporan Tahunan Perusahaan. Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2006*. Pontianak: Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Nurkhin, A. 2009. *Corporate Governance dan Profitabilitas: Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurlela, dan Islahuddin. 2008. *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen*

- sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Pontianak: Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Permanasari, W.I. 2010. *Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rakhiemah, A.N., dan D. Agustia. 2009. *Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ratnasari, Y. 2011. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sayekti, Y., dan L.S. Wondabio. 2007. *Pengaruh CSR Disclosure terhadap Earning Response Coefficient*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Sembiring, E.R. 2003. *Kinerja Keuangan, Political Visibility, Ketergantungan pada Hutang dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Surabaya: Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratno, I.B., dkk. 2006. *Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004)*. Padang: Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Surya, I., Dan I. Yustiavananda. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: FHUI.
- Terzaghi, M.T. 2012. *Pengaruh Earning Management dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, vol. 2, no.1.
- Tika, M.P. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Untari, L. 2010. *Effect on Company Characteristics Corporate Social Responsibility Disclosures in Corporate Annual Report of Consumption Listed in Indonesia Stock Exchange*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Utami, I.D., dan Rahmawati. 2006. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Umur Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Veronica, dan N.S. Bachtiar. 2005. *Good Corporate Governance Information Asymetry and Earnings Management*. Denpasar: Simposium Nasional Akuntansi VII.
- Waryanto. 2010. *Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 2000. *WBCSD's first report-Corporate Social Responsibility*. Geneva.
- ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* <http://idx.co.id>, (Online), diakses 13 Maret 2012
- [http://menlh.go.id/hasil-penilaian proper](http://menlh.go.id/hasil-penilaian_proper), (Online), diakses 13Maret 2012
- <http://icmd.com>, (Online), diakses 28 April 2012
- KS, Angling, M.P. 2010. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Laporan Tahunan di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro